

**ANALISIS SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
STUDI PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Ubaidillah**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Ubaidubed64@gmail.com

**ABSTRAK**

Sustainability lembaga keuangan mikro syariah ini bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu keberlanjutan *Baitul Maal waf Tamwil* (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kabupaten Banyumas dipilih menjadi objek penelitian didasarkan pada perkembangan BMT yang cukup baik di wilayah ini dan memiliki karakteristik yang menarik dan beragam dari segi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa BMT berkembang pesat dan terus memperluas bisnisnya sementara beberapa BMT lain terancam bangkrut, merugi, dan tutup, tidak berjalan lagi sehingga mengancam keberlanjutan (sustainability) dan perkembangan lembaga keuangan mikro syariah tersebut dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, subyek yang akan diteliti terletak pada masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Baitul maal wattamwil. Masalah-masalah tersebut diproksikan menjadi internal dan eksternal. Masalah-masalah internal maupun eksternal tersebut meliputi kinerja lembaga yang belum optimal, kapasitas sumberdaya insani yang belum profesional, kinerja keuangan yang belum baik, permodalan yang lemah, dan infrastruktur yang kurang baik, regulasi yang tidak efektif dan pengawasan yang tidak maksimal. Faktor-faktor eksternal dan internal ini diolah menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 23.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Sustainability, BMT.

Aktivitas perekonomian di Indonesia, terutama sektor keuangan sangat didukung oleh lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian (Guiding Principles on Regulation and Supervision of Microfinance, Microfinance Consensus Guidelines 2009), akan tetapi selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro kecil menengah yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana

menurut lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan kinerja pertumbuhannya terhambat. Keterbatasan akses kepada sumber pembiayaan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada perbankan, mengakibatkan ketergantungan pada sumber-sumber informal dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal (Tohari 2003).

Keberhasilan LKM dalam mencapai tujuan pembangunan telah dijelaskan di berbagai studi. Fakta di negara berkembang menunjukkan bahwa LKM tidak hanya sebagai lembaga keuangan saja namun juga sebagai alat pembangunan dalam pengentasan kemiskinan (Murdoch 1999). Kemampuan Lembaga Keuangan Mikro dalam mengentaskan kemiskinan tidak semata-mata memiliki jumlah aset yang besar. Tetapi lebih kepada kemampuan LKM yang bersangkutan dalam menjaga neraca keuangannya, antara lain kemampuan menghimpun dana dari anggota dan non anggota, dan kemampuan menyalurkan untuk modal usaha kepada masyarakat miskin. Selain itu, meski hal ini tidak berlaku umum di semua Lembaga Keuangan Mikro, terdapat dua aspek yang dijadikan pedoman untuk mengukur kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu : keterjangkauan (*outreach*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah didefinisikan sebagai sistem keuangan yang berlandaskan kepada syariat Islam. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dimaksud adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berasal dari penggabungan dari lembaga *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat filantropi (sosial), sedangkan *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat bisnis (*profit motive*) (Mafruhah 2002).

BMT sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem ksyariah. Jenis-jenis usaha BMT dimodifikasi dari produk perbankan Islam terbagi menjadi dua bagian utama yaitu mobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil. Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil dan menengah, BMT mengemban misi yang lebih luas, yaitu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Sebagai perwujudan lembaga keuangan mikro syariah, BMT dinilai sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat kecil. Sistem kerjasama yang ditawarkan BMT bagi usaha kecil dan menengah mampu melayani usaha kecil dengan skala pinjaman yang ditentukan secara efisien dan menguntungkan kedua belah pihak, baik BMT sendiri maupun peminjam (Zarida 2012).

BMT di Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh jika BMT mampu mengatasi berbagai masalah dalam operasionalnya. BMT sebagai bagian dari LKMS seharusnya memiliki pilar-pilar atau berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi keberlanjutan (*sustainability*) industri keuangan mikro. Menurut Bank Indonesia, dalam cetak biru BPR disebutkan bahwa pilar industri BPR terdiri dari struktur industri, regulasi, supervisi, kondisi internal, infrastruktur kelembagaan dan perlindungan nasabah (BI 2006). Banyak BMT yang tidak stabil dan bangkrut tidak terlepas dari akibat kegagalannya dalam mengelola resiko-resiko yang ada. Bila dilihat dari aspek resiko operasional, maka BMT termasuk lembaga keuangan yang sangat beresiko karena kontrol dan pengawasan terhadap kualitas SDI, profesionalitas dan integritas terhadap pengelola masih lemah sehingga tidak jarang ditemukan praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengelola BMT, seperti penggelapan dan penyelewengan dana nasabah dan sebagainya. Di sisi lain, kapasitas BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana.

Perumusan prinsip-prinsip sustainabilitas BMT sebagai upaya mencari bentuk ideal pengembangan BMT dimasa yang akan datang. Rumusan ini bisa dijadikan sebagai patokan bagi pengembangan BMT sebagai sebuah sistem intermediasi keuangan berbasis syariah di level mikro. Kendala-kendala yang dihadapi BMT, baik yang bersifat internal maupun yang eksternal, perlu segera diselesaikan agar sustainabilitas BMT tetap terjaga. Prinsip-prinsip tersebut dapat dirumuskan dengan baik apabila terlebih dahulu ditemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sustainabilitas BMT. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BMT lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merancang kebijakan-kebijakan yang diperlukan, baik dari pemerintah maupun Bank Indonesia untuk mendorong pengembangan BMT, sehingga secara luas dan berkelanjutan mampu menjangkau dan memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah melalui ekonomi produktif.

Melihat peran strategis BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, maka tulisan ini akan menguji faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sustainabilitas BMT sebagai Lembaga keuangan mikro syariah. Sustainabilitas LKMS dalam penelitian ini adalah kondisi dimana BMT dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana secara berkelanjutan melalui pendekatan profit. Menyadari pentingnya sustainabilitas bagi masa depan BMT maka penulis mengambil judul ‘Analisis Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Banyumas’.

## **A. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Alasan karena didasarkan pada pertimbangan perkembangan BMT yang cukup baik dan memiliki karakteristik yang

menarik dan beragam dari segi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam tulisan ini.

Menurut pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang bersifat obyektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistic (Asep Hermawan 2003). Selain itu, menggunakan pendekatan survei yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini termasuk *explanatory research* karena bermaksud menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Husein Umar 1999).

Variable yang diuji dalam penelitian ini terdiri atas variable independen dan variable dependen. Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal yaitu SDM (X1), manajemen (X2), permodalan (X3), jangkauan pasar (X4), regulasi (X5), pengawasan (X6), infrastruktur (X7). Sedangkan variable dependen adalah sustainabilitas (Y).

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BMT yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas yang berjumlah 14 BMT yang tersebar di beberapa kecamatan (PBMTI 2015).

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil untuk diselidiki (Sugiyono 1999). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak tiga BMT yang beroperasi di Kabupaten Banyumas. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengambil sampel secara acak dari populasi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti agar diperoleh sampel yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini melibatkan pemilik atau manajer BMT sebagai respondennya dengan kriteria antara lain: pertama, BMT yang dipilih menjadi responden adalah BMT yang memiliki karyawan dalam menjalankan usahanya. Kedua, BMT sudah berjalan minimal 3 tahun dan memiliki aset kecil, aset sedang, dan aset besar. Kriteria ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang mengacu kepada kriteria yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana aset kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan aset sedang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan aset besar adalah memiliki kekayaan melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *multiple regression analysis*. Penggunaan alat analisis *multiple regression analysis* didasarkan pada penelitian yang dilakukan yaitu menekankan pada pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menetapkan ada atau tidaknya pengaruh antar sustainabilitas BMT dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah adalah fenomena tahun 1990-an, kurang lebih 20 tahun yang lalu namun telah nyata memberikan andil yang cukup kongkrit dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga banyak diteliti dalam kerangka keilmuan dengan bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Dalam kajian pustaka ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah BMT.

Penelitian The Asia Foundation dengan tema *Microfinance Service in Indonesia : Survey of Institution in 6 Provinces* mengkaji lembaga keuangan bank dan lembaga non bank, termasuk BMT yang ada di daerah Bandung, Madiun, Pontianak, Samarinda, Manado dan Jayapura. Fokus kajian diantaranya adalah mengevaluasi kapabilitas lembaga keuangan mikro di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Kapabilitas yang dimaksud dalam kajian ini yaitu efisiensi, *sustainability* dan *ability*, terutama kemampuan dalam pengembangan jaringan pelayanan dan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam mengembangkan jaringan kelembagaan yang luas (Foundation 2003).

Dari perspektif sosial dan komersial, Robinson melakukan penelitian perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia dengan dukungan The World Bank. Kajiannya berfokus pada peran BRI dalam menjangkau akses permodalan bagi masyarakat pedesaan yang memiliki kemampuan produktif tapi tiak *bankable*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah penyediaan jasa keuangan mikro (Robinson 2002).

Studi yang secara khusus menggambarkan peran BMT sebagai salah satu LKMS dilakukan oleh Awalil Rizky yang menggambarkan kelebihan BMT dibandingkan dengan lembaga konvensional dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Tetapi, hasil penelitian ini

belum menampilkan faktor-faktor sosial yang membuat kinerja BMT lebih baik dari sistem konvensional. Fakta yang sangat menonjol dari BMT adalah keberhasilannya dalam usaha penyaluran dana pembiayaan kepada anggota atau nasabah. BMT telah menjadi sebuah lembaga keuangan profesional yang berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini tidak mempunyai akses pembiayaan perbankan (Rizky 2007).

Penelitian yang juga secara khusus menjadi peran LKM terhadap UKM dilakukan oleh Euis Amalia dalam disertasi yang berjudul “*Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*”. Studi ini menemukan bahwa LKMS-BMT menjadi pilihan dalam hal pendanaan dan akses finansial dan terbukti mampu memberikan pelayanan prima dan meningkatkan omzet maupun pendapatan kelompok usaha kecil mikro (UKM) yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia serta memiliki kemampuan produktif dan memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional (Euis Amalia 2009).

Penelitian lain yang berkaitan dengan BMT adalah penelitian Nur Said dengan judul “*Kedudukan BMT dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia dan Tantangannya ke Depan*”. Dalam penelitian ini, Nur Said mengemukakan bahwa, kedudukan BMT dalam tata hukum perbankan di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek regulasi, dari aspek kelembagaan, BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam fungsinya yang demikian, BMT berkedudukan sebagai Bank Sekunder, yaitu bank yang hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit yang biasanya beroperasi di daerah pedesaan, seperti halnya Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dari aspek regulasi, dikemukakan bahwa saat ini regulasi yang mengatur aspek perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU tersebut, hanya terdapat dua bentuk bank Islam yang diakui, yaitu dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Syariah (BPRS) (Nur Said 2005).

Studi yang menelaah BMT juga dilakukan oleh Minako Sakai. Sakai mengklaim bahwa BMT berdiri untuk mengisi keengganan bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha UMKM karena beresiko tinggi untuk gagal bayar. BMT telah menjadi LKM alternatif selain sebagai penyedia modal informal dan juga menyediakan lapangan pekerjaan, BMT juga mengusung nilai-nilai dan lembaga-lembaga agama dalam mengatasiresiko *wanprestasi* dan menjalin hubungan sosial antara manajer dan nasabahnya (Minako Sakai 2008).

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Mu'alim dan Abidin yang mengidentifikasi beberapa penyebab kegagalan pengelolaan BMT. Pertama, kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola, baik dari sisi pengetahuan atau keterampilan dalam mengelola BMT, terutama masalah pengguliran pembiayaan. Kasus riil adalah banyaknya pembiayaan yang tidak tertagih (pembiayaan macet). Kedua, lemahnya pengawasan pada pengelolaan, terutama manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola BMT. Akibat dari hal tersebut, citra BMT yang timbul di mata masyarakat menjadi kurang baik. BMT diidentikkan sebagai suatu lembaga keuangan yang tidak dapat dipercaya, kurang ditangani secara profesional dan tidak menunjukkan nilai-nilai Islam. Ketiga, hal lain yang menjadi penyebab kegagalan pengelolaan BMT adalah adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan. Terdapat ketidakcocokan dari garis syariah yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan diri para nasabah. Banyak BMT yang kurang menhayati dan menerapkan konsep syariah secara *kaffah* dalam pengelolaannya. Nama BMT kadang hanya dijadikan sebagai simbol untuk tujuan bisnis tertentu. Keempat, masih minimnya peran pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas BMT. Pemerintah belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai pengembangan BMT sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat kecil. Keberadaan BMT masih tumbuh secara swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan yang ada (Amir Mu'alim dan M. Zainal Abidin 2005).

Penelitian lainnya tentang kinerja BMT dilakukan oleh Santoso. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja BMT dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia masing-masing BMT yang terdiri atas lima kompetensi yaitu pencapaian hasil, pembinaan usaha, kepemimpinan, manajerial dan kepribadian (Hurip Santoso 2012). Sementara itu, Satria, Ferry dan Yopi, dalam penelitiannya menyimpulkan strategi pengembangan BMT berorientasi pada kekuatan keuangan, *institutional soundness* dan efek sosial. Hal ini tentu saja harus didukung dengan alaisa fiqh dan ekonomi yang memadai serta didorong dengan kekuatan sumber daya yang cukup. Di sisi internal penguatan institusi yang dilakukan pada manajerial dan pengelolaan keuangan harus ditingkatkan untuk memajukan BMT. Kesuksesan BMT dipengaruhi oleh banyak aspek, diantaranya aspek manajemen, sumber daya manusia, pemasaran dan kondisi keuangan yang dimilikinya. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui gambaran kesuksesan BMT dilihat dari aspek keuangannya (Satria 2004).

Muhammad Akhyar Adbab dkk, meneliti kinerja BMT dengan judul : *Study on Factors Influencing Performance of the Best Baitul Maal Wat Tamwils (BMTs) in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BMT-BMT terbaik di Indonesia sehingga mampu bertahan (*sustainability*) dalam krisis ekonomi. Data penelitian

diambil dari 47 BMT terbaik di Indonesia yang terdapat di 5 Provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja BMT yaitu gaji yang diterima manajemen, tingkat pendidikan, dan kemampuan manajemen pengelola serta produk yang ditawarkan. Implikasi dari temuan ini bahwa terdapat kebutuhan penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan manajemen pengelola serta menaikkan gaji manajer BMT (Muhammad Akhyar Adnan 2003).

Widiyanto mengkaji sustainabilitas pembiayaan BMT dengan judul : *Effectiveness and Sustainability of Baitul Mal Wat Tamwil Financing in the Development of Micro-Enterprises In Central Java, Indonesia*. Tujuan kajian ini ialah mengkaji keefektifan dan keberlanjutan pembiayaan BMT untuk memajukan usaha mikro. Dengan menggunakan analisis DEA, hasil kajian ini menemukan bahwa kemampuan efisiensi BMT untuk jangka masa 2002-2005 secara relatif adalah rendah. Temuan ujian/sampel berpasangan menunjukkan bahwa pembiayaan BMT mampu meningkatkan prestasi usaha mikro secara signifikan dengan meningkatkan keuntungan, pendapatan dan jumlah pekerja (Widiyanto 2012).

Teori sustainabilitas LKM yang dikembangkan selama ini menyatakan bahwa sustainabilitas LKM adalah kemampuan LKM dalam menjalankan sistem yang telah dibangun agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Begitupun LKM yang memiliki kemampuan sebagai peyedia keuangan mikro untuk menutupi semua biaya dalam mencapai *financial sustainability*. Sistem tersebut dalam konsep sustainabilitas LKMS diukur berdasarkan pada *sharia compliance finance* yang merujuk pada pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya modal dan biaya pendanaan. Pendapatan dan biaya modal dalam LKMS diperoleh bukan dari transaksi *tadlis, maysir, gharar, dan riba*. Sustainabilitas LKMS merupakan kemampuan lembaga dalam bertahan, secara terus menerus dalam menutupi biaya operasional dengan menggunakan pendapatan usaha yang dihasilkan dari aktifitas bisnis (Woller 1991).

Pengawasan terhadap BMT dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan melalui pembentukan atau penunjukan suatu lembaga eksternal yang independen untuk menilai tingkat kesehatan BMT. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Aktivitas BMT berkaitan erat dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap stakeholders BMT diharapkan tetap menjaga kepercayaan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini akan terjaga apabila BMT diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya. Atas dasar itu, BMT harus diatur dan diawasi dengan ketat. Pentingnya pengawasan terutama untuk melindungi



nasabah dan menghindari *moral hazard* sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara lembaga dan nasabah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif membutuhkan adanya pengawas dengan kompetensi khusus karena aspek-aspek yang diawasi sangat spesifik dan rinci.

BMT merupakan lembaga kepercayaan sehingga sumber daya manusia merupakan aset utama yang harus mempunyai integritas dan kompetensi. Sumber daya manusia ini harus bias mengelola BMT secara profesional dan transparan dengan sistem manajemen operasional yang baik. Aspek sumber daya manusia atau sumber daya insani berkaitan dengan tingkat pendidikan. Bagaimanapun tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mampu membentuk kompetensi seseorang. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Akhyar bahwa kinerja BMT dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dan pengelola BMT (Muhammad Akhyar Adnan 2003). Dengan mengacu pada penilaian tingkat kesehatan BMT, dapat diketahui bahwa unsur utama dari sustainabilitas adalah tata kelola yang baik dan kualitas manajemen dan operasional. Tata kelola atau manajemen operasi diukur dengan indikator penerapan standar operasional dan prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM). Dengan penerapan Standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen maka operasionalisasi lembaga akan berdasarkan suatu sistem yang baik, sehingga terjamin adanya profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Salam pada industri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menemukan bahwa semakin baik penerapan SOP dan SOM pada suatu koperasi maka semakin tinggi nilai rating KSP tersebut (Abdul Salam n.d.).

Untuk mendukung keberlangsungan usahanya, BMT memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional dan untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa keuntungan. Dalam operasionalnya, BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra. Untuk melakukan pembiayaan berkelanjutan, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami keterbatasan dalam hal permodalan. Permodalan BMT bersumber dari internal maupun eksternal. Sumber-sumber permodalan tersebut membentuk faktor permodalan yang mempengaruhi sustainabilitas BMT. Pentingnya variabel penguatan permodalan sebagaimana dipaparkan dalam penelitian Morshed tentang pengalaman sukses Grameen Bank sebagai pelaku keuangan mikro (Lamiya 2013). Permodalan sebagai faktor penting bagi sustainabilitas LKMS, selain pembinaan pemerintah secara terpadu dan berkelanjutan, pengelola LKMS yang dihasilkan dari pelatihan SDM dan kebijakan yang memihak pada LKMS. Indikator yang digunakan dalam menilai kinerja LKMS adalah kenaikan laba serta perkembangan usaha, omzet dan aset, serta kebijakan pemerintah..

Faktor jangkauan pasar juga menjadi penting dalam menentukan sustainabilitas BMT, semakin luas jangkauan pasar maka semakin banyak nasabah yang bias mengakses pelayanan BMT tersebut.

Hasil analisis regresi yang dilakukan menggunakan model regresi sebagai berikut:

#### 1. Model Regresi Pertama

Model regresi pertama dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel penyusun faktor internal, yaitu SDI (X1), Manajemen (X2), Permodalan (X3) dan jangkauan pasar (X4) terhadap Sustainabilitas BMT (Y). Hasil analisis regresi model ini dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1: Model Summary Model I**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,718	0,515	0,449	3,584

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai *R square* sebesar 0,515. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa besaran koefisien determinasi dalam model regresi ini adalah 51,50% yang berarti bahwa variabel sustainabilitas BMT dalam penelitian ini 51,50% nya dijelaskan oleh faktor internal yaitu variabel SDI, manajemen, permodalan dan jangkauan pasar. Sedangkan 41,50% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar keempat variabel yang telah disebutkan.

Selanjutnya, pengujian pengaruh masing-masing variabel dilakukan dengan penjelasan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2: Coefficient Model I**

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	T	Nilai Sig.
Constant	-0,146		-0,054	0,957
SDI (X1)	0,658	0,328	3,362	0,001
Manajemen (X2)	0,568	0,180	1,851	0,068

Permodalan (X3)	0,544	0,374	3,436	0,002
Jangkauan Pasar (X4)	0,657	0,247	2,426	0,019

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan dari keempat variabel penyusun faktor internal BMT, terdapat tiga variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu variabel sumber daya insani, permodalan, dan jangkauan pasar. Hal ini berarti bahwa variabel sumber daya insani, permodalan dan jangkauan pasar suatu BMT memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap Sustainability BMT. Sedangkan variabel yang lain, yaitu manajemen BMT tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Sustainability BMT. Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat disusun persamaan model regresi kedua sebagai berikut:

$$Y = -0,146 + 0,689 (X4) + 0,569 (X5) + 0,543 (X6) + 0,083 (X7) + 0,204 (X8) + \epsilon_1$$

## 2. Model Regresi Kedua

Model regresi kedua dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel faktor eksternal, yaitu regulasi (X5), pengawasan (X6), infrastruktur (X7) terhadap Sustainability BMT (Y). Hasil analisis regresi model ini dijelaskan tabel berikut :

**Tabel 3: Model Summary Model II**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,686	0,471	0,447	3,582

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *R square* sebesar 0,471. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa besaran koefisien determinasi dalam model regresi ini adalah 47,10% yang berarti bahwa variabel sustainability BMT dalam penelitian ini 47,10% nya dijelaskan oleh faktor eksternal yaitu variabel regulasi, pengawasan, dan infrastruktur. Sedangkan 52,90% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar ketiga variabel tersebut. Selanjutnya, pengujian pengaruh masing-masing variabel dilakukan dengan didasarkan pada penjelasan tabel berikut ini :

**Tabel 4: Coefficient Model II**

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	T	Nilai Sig.
Constant	-10,794		-2,597	0,012
Regulasi (X5)	0,658	0,245	2,424	0,017
Pengawasan (X6)	0,813	0,277	2,599	0,0013
Infrastruktur (X7)	0,635	0,386	3,946	0,001

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi ketiga variabel faktor eksternal berada di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel regulasi, pengawasan dan infrastruktur memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap sustainabilitas BMT. Semakin tinggi faktor eksternal maka semakin tinggi pula sustainabilitas BMT. Artinya semakin baik regulasi, pengawasan dan infrastruktur yang ada dapat memberikan pengaruh positif terhadap sustainabilitas BMT.

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat disusun persamaan model regresi pertama sebagai berikut:

$$Y = -10,793 + 0,659 (X1) + 0,812 (X2) + 0,634 (X3) + \varepsilon_1$$

Berdasarkan dari analisis data di atas, menunjukkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh terhadap sustainabilitas BMT adalah aspek SDI, permodalan, jangkauan pasar, regulasi, pengawasan, dan infrastruktur.

### 1. Sumber Daya Insani

Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) atau sumberdaya manusia pengelola BMT dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal pengelola dan frekuensi pelatihan yang terkait dengan tugas serta pengalaman pengelola. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa aspek sumber daya insani terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Akhyar yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan para pengurus BMT merupakan faktor yang

menentukan kemampuan bertahan (*sustainability*) BMT secara keseluruhan. (Adnan, et. al., 2003).

Persoalan profesionalitas para praktisi Lembaga keuangan syariah adalah syarat utama untuk baiknya Lembaga keuangan syariah. Untuk mencapai profesionalitas praktisi keuangan syariah diperlukan kemampuan dasar dan kemampuan keahlian, kedua kemampuan tersebut disebut dengan kompetensi. Kompetensi dasar adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua praktisi Lembaga keuangan syariah, para praktisi Lembaga keuangan syariah harus memiliki mind set ekonomi syariah secara benar seperti memiliki ketakwaan kepada Allah SWT, berorientasi untuk mendapatkan keberkahan, niat ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan kompetensi khusus atau keahlian adalah kemampuan atau keahlian khusus yang wajib dimiliki sesuai dengan bidang yang digeluti. Penguasaan kompetensi khusus ini kemudian disebut dengan profesionalitas. Selain profesional juga harus jujur, amanah, tidak melanggar prinsip syariah, dan memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan Lembaga keuangan syariah dengan baik.

## **2. Permodalan**

Permodalan BMT dalam penelitian ini adalah dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut yang berasal dari pemilik BMT maupun modal BMT yang diinvestasikan pada nasabah dan modal nasabah yang diinvestasikan pada BMT. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa permodalan yang diukur dengan simpanan anggota berdasarkan jumlah total nilai simpanan, simpanan anggota berdasarkan jumlah rekening simpanan, pinjaman diterima berdasarkan jumlah total nilai pinjaman yang diterima dan pinjaman yang diterima berdasarkan jumlah kreditur pemberi pinjaman terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT.

Perguliran dana BMT pada awalnya diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor, dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain. Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Semisal BMT dapat mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti memiliki

kios, property, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industry rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan profesional. Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota tetapi justru akan mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara Bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok.

### **3. Jangkauan pasar**

Jangkauan pasar dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT dalam mengakses dana dari masyarakat dan mendistribusikannya, semakin besar kemampuan BMT dalam menjangkau nasabah semakin besar skala ekonominya sehingga biaya operasional semakin efisien. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan, diketahui bahwa jangkauan pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT. Penetrasi BMT dalam mengakses pasar menjadi elemen penting dalam sustainabilitas atau keberlangsungan bisnis BMT, hal ini berpengaruh terhadap strategi yang dilakukan seperti promosi yang lebih luas, jempit bola sampai dengan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi bagi BMT saat ini juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang diterapkan oleh Lembaga keuangan yang lainnya. Perkembangan BMT akan lebih menuju penggunaan teknologi informasi dan system online berbasis internet. Model bisnis BMT akan sulit tersaingi karena apabila dikelola dengan prinsip syariah dan jati diri koperasi, akan membentuk ekonomi berbasis komunitas yang kuat.

### **4. Regulasi**

Regulasi merupakan faktor yang penting dikarenakan operasional BMT dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa aspek regulasi yang dibentuk oleh indikator kecukupan peraturan dan penerapan prinsip kehati-hatian serta penerapan standar keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT. Temuan ini didukung pula oleh penelitian Staschen yang mengungkapkan bahwa terdapat dua instrumen regulasi, yaitu perlindungan dan pencegahan. Instrumen perlindungan dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi nasabah dan lembaga keuangan mikro dari kemungkinan bangkrut. Sedangkan instrumen pencegahan dimaksudkan untuk mencegah agar lembaga keuangan mikro tidak mengalami kebangkrutan. (Staschen, 1994).

Sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena Lembaga keuangan syariah seperti BMT dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional dengan pola ini BMT terhindari dari negative spread, sebagaimana Lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah memiliki misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerjasama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan. BMT tahan uji terhadap gelombang ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk beban bunga tinggi sebagaimana berlaku pada system konvensional. Dengan demikian, BMT memiliki peluang cukup besar dalam berperan mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan diatas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun para pengguna dana. Regulasi menjadi faktor penting dalam keberlanjutan bisnis BMT, karena selama ini belum ada payung hukum yang jelas dan spesifik terkait dengan operasionalisasi BMT. Perlu dibuat UU khusus dan menyeluruh yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BMT (pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, dan pengelolaan zakat melalui konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan). Harus ada sinergitas yang baik antara BMT dan Lembaga filantropi supaya saling bisa mendukung antar sektor untuk mensejahterakan masyarakat.

## **5. Pengawasan**

Pengawasan yang efektif merupakan salah satu alat untuk mendeteksi permasalahan secara dini (*early warning system*). Indikator-indikator yang membentuk pengawasan yang efektif dalam penelitian ini adalah sistem pelaporan, efektivitas pelaksanaan laporan dan pengawasan eksternal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwa aspek pengawasan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT.

Badan pengawas adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Yang termasuk dalam kebijakan operasional BMT antara lain memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Pihak-pihak yang bisa masuk menjadi badan pengawas ini adalah anggota, badan pendiri, penyerta modal awal yang memiliki penyertaan tetap, anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan badan pendiri atas usulan badan pengawas, dan DPS.

DPS atau dewan pengawas syariah mempunyai tugas yang unik, berat, dan strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa Lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan di atas rel syariah dan tidak menyimpang. Keunikan ini makin kentara jika kita membandingkan pada institusi keuangan konvensional dimana tidak terdapat adanya Dewan Pengawas Syariah, bahkan dalam Lembaga-lembaga lain yang mengklaim dirinya sebagai Lembaga Islam semisal Rumah Sakit Islam, sekolah Islam ataupun universitas Islam tidak ada kewajiban untuk memiliki institusi DPS ini. Kesyariahan sebuah Lembaga keuangan syariah seperti BMT ditentukan oleh kompetensi anggota DPS, apakah sudah mematuhi ketentuan syariah atau ada pelanggaran di dalamnya.

## **6. Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan faktor yang penting bagi BMT. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa aspek infrastruktur dibentuk oleh indikator-indikator yang terdiri dari peran asosiasi, lembaga rating, jasa audit, lembaga induk dan lembaga penjamin simpanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT.

Keberadaan asosiasi berperan dalam pelatihan, konsultasi serta upaya akses dana dari lembaga keuangan kepada anggota. Mengenai keberadaan lembaga rating dan jasa audit independen bagi BMT sangat diperlukan namun masih perlu sosialisasi lebih lanjut untuk membentuk persepsi yang benar mengenai pelaksanaan audit dan rating. Jasa audit dan rating diperlukan sebagai penilai kinerja keuangan independen sehingga lebih obyektif dan transparan. Sedangkan lembaga induk dan lembaga penjamin simpanan (LPS) bagi nasabah BMT sebagai lembaga pendukung sangat diperlukan. Keberadaan LPS sangat dibutuhkan untuk mendukung penguatan sumber dana BMT. Namun untuk saat ini masih belum dimungkinkan adanya lembaga LPS nasabah BMT karena belum terpenuhinya prasyarat terbentuknya industri BMT yang terstandardisasi.

## **SIMPULAN**

Faktor-faktor internal dan eksternal Lembaga keuangan mikro syariah memiliki pengaruh terhadap sustainabilitas BMT adalah aspek SDI, permodalan, jangkauan pasar, regulasi, pengawasan, infrastruktur. Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai tuntunan untuk meningkatkan kinerja BMT menuju sustainabilitas lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Temuan ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi pengembangan BMT sebagai sebuah sistem intermediari keuangan berbasis syariah di level mikro. Kendala-kendala yang dihadapi BMT, baik



yang bersifat internal maupun yang eksternal, perlu segera diselesaikan agar sustainabilitas BMT tetap terjaga.

Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan BMT tidak terlepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal BMT itu sendiri yang menjadikan lembaga BMT tetap eksis. Oleh karena itu, untuk penguatan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), diperlukan dua sisi. Dari sisi internal berupa penguatan permodalan dan sumberdaya manusia sehingga BMT dapat tumbuh menjadi organisasi yang profesional dan transparan untuk meningkatkan kontribusi BMT dalam memberikan solusi permodalan bagi usaha mikro di seluruh Indonesia khususnya di Banyumas. Sedangkan dari sisi eksternal berupa peranan para *stakeholders* dalam hal ini pemerintah, perusahaan, perbankan syariah, asosiasi dan masyarakat dalam upaya mendukung sustainabilitas dan menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi tumbuh kembangnya BMT di Indonesia khususnya banyumas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amin Suma Muhammad. (2008). *Menggali Akar Mengurai Serat. Ekonomi dan Keuangan Islam*. Kholam Publishing.
- Ade Wirman Syafei. (2009). *Proses Review Syariah Bank Islam di Indonesia: mencari Standar Umum yang di Terima. Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Kencana Predana.
- Agoes Sukrisno. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* Jakarta. Penerbit FE UI.
- Bhuono Agung Nugroho. (2005). *Strategi Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Penerbit Andi.
- Creswell. John W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghozali Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan Asep, (2003) *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta. LPFE. Trisakti.
- Hafiduddin Didin & Tanjung Hendri. (2003). *Manajemen Syariah dan Praktik*. Jakarta : Gema Insani
- Ismail. (2009). *Akuntansi Bank. Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta : Kencana.
- Isgiyarta Jaka. (2009). *Teori akuntansi dan laporan keuangan Islam*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indra Bastian Suhardjono. (2006). *Akuntansi Perbankan*. Jakarta ; Salemba Empat.
- Indiantoro Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Manan Abdul. (2000). *Membangun Islam Kaffah*. Madina Pustaka.
- Mulyadi. (1988). *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta. BPFE Anggota IKAPI.
- Muhammad Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah. Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta : P3EI Press.
- Muhammad. (2002). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat.

- Nurhayati Sri. Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Peter Connoly. Ninian Smart. (2002). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. LKIS.
- Rifqi Muhammad. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press.
- Ramli Hasbi. (2005). *Teori dasar akuntansi Syariah*. Edukasi Profesional Syariah.
- Rochaety Ety. dkk. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2007). *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surakhmad Winarto. (2010). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Supranoto. J. (2001). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi ke enam Jilid Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Suhardjono Bastian Indra. (2006). *Akuntansi Perbankan*. Salemba Empat.
- Syahatah Husein. (2001). *Pokok-pokok Akuntansi Islam*. Akbar.
- Yaya Rizal. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.